

# Komparasi Kebijakan Luar Negeri Presiden Joko Widodo dengan Presiden Xi Jinping dalam Merespons Sengketa Laut Cina Selatan Menggunakan Pendekatan *Small Theory*

Nadhila Harnifah, Salsa Melia Putri,  
Yeni Greis Manullang, Zalwa Apriliana Sesa

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta

E-mail: [nadhilah@upnvj.ac.id](mailto:nadhilah@upnvj.ac.id); [salsam@upnvj.ac.id](mailto:salsam@upnvj.ac.id); [yenigm@upnvj.ac.id](mailto:yenigm@upnvj.ac.id);  
[zalwaas@upnvj.ac.id](mailto:zalwaas@upnvj.ac.id)

## ABSTRACT

*The dynamics of the conflict in the South China Sea have a big impact on the conflict resolution process involving various countries. One of them has implications to tension between Indonesia and China with the unilateral claims made by China on the Natuna block albeit Indonesia is not directly involved to the conflict. The purpose of this research is to analyze the comparison of policy action between President Joko Widodo and President Xi Jinping in responding to the South China Sea conflict. This research is analysed using the foreign policy analysis theory, Small Theory. The results shows that there are differences between the two figures in terms of point of view and characteristics in determining the foreign policy action. The various factors behind these differences will affect every foreign policy action step adopted by the two figures.*

**Keyword : Comparison, Foreign Policy, Conflict, the South China Sea.**

*Dinamika konflik di Laut Cina Selatan memiliki dampak yang besar dalam proses penyelesaian konflik dengan melibatkan berbagai negara. Salah satunya berimplikasi pada ketegangan antara Indonesia dan Cina dengan adanya klaim sepihak yang dilakukan Cina akan blok Natuna walaupun Indonesia tidak secara langsung terlibat dalam konflik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa komparasi langkah kebijakan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Xi Jinping dalam merespons konflik Laut Cina Selatan. Penelitian ini dianalisa menggunakan teori analisis kebijakan luar negeri Small Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kedua tokoh dari segi pandangan dan karakteristik dalam menentukan langkah kebijakan luar negeri yang diambil. Berbagai faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut akan berpengaruh terhadap setiap langkah kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh kedua tokoh tersebut.*

**Kata kunci : Komparasi, Kebijakan Luar Negeri, Laut Cina Selatan.**

## Pendahuluan

Asia Pasifik merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Hal ini menyebabkan banyaknya konflik yang rentan terjadi di kawasan ini. Salah satu konflik yang terjadi antarnegara di wilayah Asia Pasifik ini adalah sengketa Laut Cina Selatan. Konflik ini berawal dari China yang mengklaim secara sepihak wilayah perairannya yang meliputi wilayah perairan negara lain. Hal ini menyebabkan beberapa negara ikut mengklaim wilayah perairannya masing-masing yang telah di klaim oleh China. Filipina, Taiwan, dan Vietnam merupakan negara-negara yang ikut mengklaim wilayah perairannya di dalam konflik Laut Cina Selatan ini. Brunei dan Malaysia pun baru-baru ini ikut

mengklaim wilayahnya di perairan Laut Cina Selatan ini (Cobus, n.d.). Hingga saat ini, isu keamanan regional ini masih belum menemukan titik penyelesaian dan dikhawatirkan akan berimplikasi pada stabilitas kawasan Asia Pasifik di masa mendatang.

Meskipun Indonesia tidak secara langsung terlibat di dalam sengketa ini, namun klaim yang dilakukan secara sepihak oleh Cina terhadap blok Natuna yang dimiliki oleh Indonesia menimbulkan implikasi yang meluas ke masalah krusial yang berpotensi mengancam kedaulatan teritorial Indonesia. Sehingga konflik ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap *claimant states* maupun *non-claimant states*. Keterlibatan Indonesia dalam konflik ini merupakan bukti implementasi kepentingan nasional untuk ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia dan diharapkan mampu menengahi sengketa yang terjadi antara negara ASEAN dan China terkait konflik laut dengan memanfaatkan hubungan baik yang dimiliki Indonesia dan China (Arsana, 2012).

Beberapa negara terlibat di kawasan Asia Pasifik telah menerapkan kebijakan politik luar negerinya masing-masing terkait konflik ini. Presiden Indonesia, Joko Widodo, telah menerapkan empat pendekatan dalam langkah kebijakan Indonesia terkait konflik Laut Cina Selatan ini. Empat pendekatan yang diterapkan oleh Presiden Joko Widodo terkait konflik ini yaitu yang pertama melalui pendekatan geopolitik dengan lahirnya Doktrin Poros Maritim Dunia. Kedua, pendekatan pertahanan dan keamanan dilakukan melalui peningkatan anggaran militer terutama untuk menambah dan mengganti alutsista. Ketiga, pendekatan hukum dan diplomasi yang telah dilakukan sepanjang proses penyelesaian konflik, dan yang terakhir pendekatan kerjasama ekonomi yang dilakukan dengan memperluas kerjasama ekonomi di kawasan laut Cina Selatan.

Sedangkan Presiden Cina, Xi Jinping, melakukan berbagai aktivitas *high profile* dalam menunjukkan ambisinya untuk menguasai kawasan Laut Cina Selatan. Beberapa di antaranya yaitu China telah berhasil mengembangkannya ke berbagai negara melalui upaya mendayagunakan sumber-sumber *soft power* yang dimiliki dalam mendekati pihak lain. Kemudian ambisinya ditunjukkan oleh kebijakannya yang cenderung berupaya untuk mendominasi kawasan regional sebagai karakteristik yang melekat pada hegemon melalui berbagai langkah-langkah agresif. Salah satunya melakukan penembakan kapal nelayan Vietnam di sekitar Kepulauan Paracel pada tahun 2013 hingga 2014 yang terus memperpanas tensi kawasan. Karakteristik hegemon yang berupaya membuat tatanan tertentu demi mewujudkan kepentingan nasional ditunjukkan melalui keberhasilan upaya Cina yang menolak adanya intervensi negara luar kawasan dalam isu LCS, mempertahankan *Declaration of Conduct* (DOC) yang bersifat ambigu dan tidak mengikat, menunda pembentukan *Code of Conduct* (COC) yang akan mengatur perilaku negara secara lebih ketat di LCS, serta menghukum kapal-kapal negara lain yang memasuki wilayahnya dengan cara kekerasan.

### **Kerangka Teoritik Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan luar negeri Indonesia yang diterapkan oleh Presiden Jokowi melalui berbagai pendekatan merupakan bentuk perwujudan dari politik luar negeri Indonesia dalam merespons konflik blok Natuna di Laut Cina Selatan. Empat pendekatan yang diterapkan yaitu (1) Kebijakan geopolitik yang menggunakan konsep dasar hubungan politik luar negeri yang berkaitan dengan letak geografis Indonesia, melahirkan Doktrin Poros Maritim dunia sebagai kebijakan geopolitik Presiden Jokowi. (2) Kebijakan pertahanan dan keamanan Indonesia secara yuridis formal yaitu dengan berpegang dengan ketentuan UNCLOS 1982. (3) Kebijakan Hukum dan Diplomasi aktif dilakukan Indonesia mulai dari presiden pertama hingga presiden ketujuh demi mewujudkan kawasan teritorial yang damai dan kondusif. Pendekatan yang digunakan yaitu diplomasi *soft power* asimetris demi mencapai *win-win solution*. (4) Kebijakan kerjasama ekonomi dalam konteks penyelesaian konflik Laut Cina

Selatan yang dilakukan Indonesia ditujukan untuk mengurangi ketegangan yang terjadi antara kedua negara, dengan menciptakan paradigma saling menguntungkan dan membutuhkan di bidang ekonomi. Sedangkan kebijakan luar negeri Cina yang diterapkan oleh Presiden Xi Jinping dalam merespons konflik blok Natuna di Laut Cina Selatan yaitu cenderung kepada pelaksanaan aktivitas *high profile*, diplomasi, kerja sama ekonomi, dan militer, demi mendominasi kawasan dan menciptakan permainan diantara negara-negara bersengketa yang tujuan utamanya yaitu memenuhi kepentingan nasional negaranya.

Pendekatan yang akan digunakan dalam menganalisa pola kebijakan luar negeri Indonesia dan Cina dalam merespons konflik Laut Cina Selatan yaitu menggunakan teori analisis kebijakan luar negeri ***small theory*** yang dikemukakan oleh Laurent. Small theory didasarkan pada variabel-variabel seperti *leader's personality, cognitive consistency, evoked set, emotions, images, analogies, learning, and belief system*. Berdasarkan variabel-variabel tersebut, *small theory* terbagi menjadi empat model, yaitu (1) Aktif-Positif, yaitu pemimpin yang dianggap mampu memaksimalkan energi dan potensi dirinya untuk mendorong pertumbuhan negara, (2) Aktif-Negatif, yaitu pemimpin yang kuat secara individu dan emosional, cenderung melihat suatu permasalahan secara impulsif, agresif, ambisius, dan cenderung menjadikan kekuasaan sebagai orientasi perjuangan yang harus diperoleh, (3) Pasif-Positif, yaitu pemimpin yang cenderung kurang optimis dan mengandalkan orang lain dalam merumuskan suatu kebijakan, (4) Pasif-Negatif, yaitu pemimpin yang memiliki *self esteem* rendah dan hanya mengikuti protokol dengan asumsi bahwa mereka berperan sebagai kepala negara atas dasar keharusan, tidak memiliki nilai dan prinsip yang jelas, serta cenderung menarik diri dari konflik yang ada.

Penelitian terdahulu mengenai konflik Laut Cina Selatan telah banyak dilakukan. Dua jurnal rujukan yang dijadikan referensi oleh peneliti yaitu (1) Jurnal "Peran Pemerintah Indonesia dalam Mengelola Konflik Laut Cina Selatan" oleh Hari Utomo, Mitro Prihanto, dan Lena Andriana dari Universitas Pertahanan, dengan menggunakan teori peran, manajemen konflik dan diplomasi preventif. (2) Jurnal "Dinamika Isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis Sumber-Sumber Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Dalam Sengketa" oleh Arief Bakhtiar Darmawan dari Universitas Jenderal Soedirman, dengan menggunakan teori peran dalam menganalisa kebijakan luar negerinya. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dalam *paper* ini yaitu adanya analisa komparasi kebijakan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping dengan menggunakan teori analisis kebijakan luar negeri *small theory* yang belum diterapkan oleh para peneliti terdahulu.

## **Pembahasan**

### **Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang Diterapkan oleh Presiden Jokowi dalam Kasus Laut Cina Selatan**

Kebijakan yang pertama yaitu kebijakan geopolitik sebagai langkah dalam mempertimbangkan faktor geografis dalam mengambil keputusan politik secara tepat dan strategis, yang mengacu pada irisan antara *political geography* dengan *political science*. Fokus utamanya yaitu korelasi antara kekuatan politik, unsur wilayah geografis, dan kapabilitas laut dan darat yang dimiliki oleh suatu negara. Pendekatan geopolitik dapat dijadikan peta untuk bermain dan menganalisis kebutuhan kebijakan luar negeri suatu negara dalam hal penyelesaian hubungan konflik atau kerjasama yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya baik dalam skala lokal, regional, maupun global. Doktrin poros maritim sebagai kebijakan geopolitik Presiden Joko Widodo lahir atas kesadaran besaran luas wilayah maritim, bentuk negara kepulauan, serta potensi sumber daya yang tersedia di Indonesia, dengan letak geografis yang berada diantara dua samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kebijakan geopolitik poros maritim Jokowi kembali kepada

pandangan ideologi filosofi Pancasila dan Trisakti Soekarno yang telah diperbaharui oleh para elit politik serta tim sukses Jokowi. Upaya pengimplementasian kebijakan tersebut dibentuk melalui (1) diplomasi maritim yang berkaitan dengan masalah batas negara (2) Berkomitmen untuk menjamin integritas wilayah serta kesejahteraan pulau-pulau terluar (3) Mengamankan sumber daya alam dan zona ekonomi eksklusif (4) Meredam rivalitas sengketa teritorial antar negara (5) Memasifkan diplomasi pertahanan (Fathun, 2018).

Melalui Doktrin Poros Maritim, kita bisa menganalisa kebijakan tersebut menggunakan pendekatan **small theory** yang dikemukakan oleh Laurent, yaitu model **Pasif-Positif**. Dengan penekanan kebijakan pada pendekatan geopolitik maritim, Presiden Jokowi terkesan membentuk model kebijakan luar negeri yang memiliki ciri khas tersendiri. Namun, adanya variabel holistik berupa pengaruh pengalaman, informasi, psikologis, kegagalan di masalah, serta tujuan yang datang dari faktor eksternal dan bukan berasal dari pengalaman *decision maker* itu sendiri diasumsikan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh aktor, dalam hal ini Presiden Jokowi. Artinya, karakter Presiden Jokowi yang cenderung *open image*, terutama pada tim suksesnya, cenderung membentuk model kebijakan poros maritim yang bukan murni dari hasil pemikiran Jokowi. Minimnya pengalaman Jokowi akan 'dunia' internal atau struktural hubungan internasional mengharuskan dirinya untuk lebih terbuka terhadap seluruh pihak. Khusus dalam konteks ini, Jokowi terlihat pasif dalam hal pembentukan kebijakan yang murni atas pemikirannya sendiri karena masih cenderung mengandalkan kader partainya dalam perumusan kebijakan, namun kebijakan yang terbentuk dapat dikatakan bersifat positif karena berhasil menciptakan suatu citra identik yang baik di kancah internasional.

Kebijakan yang kedua dilakukan melalui pendekatan pertahanan dan keamanan sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan negara menggunakan kekuatan militer. Konsep keamanan dapat diasumsikan sebagai upaya *survival* dalam menghadapi *existential threat*. Strategi yang dirancang didasarkan pada rasionalitas para aktor pengambil kebijakan dan tidak memuat pertimbangan keyakinan, moral, atau hal-hal emosional lainnya. Dalam merespons konflik Laut Cina Selatan, Indonesia berpedoman pada politik luar negeri bebas-aktif melalui doktrin poros maritim dunia (Wuryandari, 2009: 30). Tujuan dari pendekatan pertahanan dan keamanan yaitu untuk mencapai *sea power*. Konsep tersebut diperkenalkan oleh seorang laksamana AL Amerika Serikat, Mahan, sebagai kapabilitas suatu negara untuk melindungi kepentingan ekonomi, politik, dan militernya dengan memaksimalkan potensi laut yang dapat memberikan dampak pada aspek daratan. *Sea power* memiliki empat prinsip, yaitu *naval power, ocean commerce, ocean science, and ocean industry*. Dalam merespons konflik Laut Cina Selatan, Presiden Jokowi secara bertahap telah meningkatkan anggaran militer Indonesia dengan tujuan untuk penambahan dan peremajaan alutsista terutama untuk menambah kapal, pesawat, serta persenjataan baru untuk menjangkau wilayah perbatasan Blok Natuna. Namun Jokowi tetap mengutamakan kebijakan pertahanan *defense support prosperity* sebagai upaya penyelesaian konflik dengan strategi defensif aktif tanpa tindakan agresif. Hal tersebut dilakukan dengan penempatan pertahanan di pulau-pulau kecil terluar untuk menjaga kedaulatan teritori negara melalui operasi militer, menjaga keamanan, serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya sebagai penunjang ekonomi (Asana, Surwatiningsih, dan Nugroho, 2017).

Melalui pendekatan pertahanan dan keamanan, kita dapat menganalisa kebijakan tersebut menggunakan pendekatan **small theory** yang dikemukakan oleh Laurent, yaitu model **Pasif-Positif**. Tindakan Presiden Jokowi tergolong pasif karena strategi *defense support prosperity* merupakan strategi pertahanan aktif tanpa tindakan agresif yang fokus utamanya hanya upaya kerjasama terkait sengketa wilayah di pulau-pulau kecil terluar, bukan upaya untuk memperoleh pengakuan atas wilayah LCS. Selain itu, tindakan Presiden Jokowi juga dapat dikatakan sebagai tindakan yang positif dengan mempertimbangkan setiap langkah yang diambil agar dapat meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.

Kebijakan yang ketiga dilakukan melalui pendekatan hukum dan diplomasi yang didasari oleh hubungan kerjasama, upaya perdamaian, dan wilayah perbatasan, dengan mengedepankan pemahaman hukum internasional. Diplomasi sendiri memiliki makna sebagai proses interaktif dua arah antarnegara melalui upaya komunikasi, relasi, dan keterkaitan, yang dilakukan demi mencapai kesepakatan politik yang akan berpengaruh pada kebijakan luar negeri masing-masing negara. Diplomasi berfungsi sebagai sarana manajemen konflik, manajemen perubahan, dan pemeliharaan secara persuasi (Roy, 1995: 35). Pendekatan hukum dan diplomasi telah dilakukan Indonesia dalam merespon konflik Laut Cina Selatan sejak presiden pertama hingga kini, Presiden Jokowi, dengan menggunakan metode diplomasi *soft power* asimetris sebagai alternatif penyelesaian konflik agar mencapai *win-win solution* diantara negara-negara yang bersengketa. Presiden Jokowi terus berpartisipasi aktif dalam pembentukan *Declaration of Conduct* (DoC) dan *Code of Conduct* (CoC) sebagai upaya penekanan tendensi konflik di Laut Cina Selatan. Melalui konsep doktrin poros maritim dunia, Indonesia mengedepankan upaya kerjasama ekonomi dan perundingan dalam menyelesaikan berbagai sengketa perbatasan. Dalam pertemuan ke-15 *Joint Working Group* (JWG) on DOC dan 10<sup>th</sup> ASEAN SOM on DOC pada tahun 2015, Indonesia melakukan pendekatan dan berhasil Menyusun struktur elemen dari COC dengan tidak memihak kepada pihak manapun.

Menteri luar negeri RI menyampaikan surat kepada ASEAN pasca diterbitkannya *Permanent Court of Arbitration* (PCA) mengenai LCS pada 2016 yang mengusulkan dibentuknya *ASEAN Statement* demi mendorong komitmen untuk menjunjung tinggi tanggung jawab ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara. Berbagai pendekatan dan konsultasi yang dilakukan secara intensif oleh Menlu RI berhasil mendorong para Menlu negara-negara ASEAN untuk mencapai kesepakatan yang memuat berbagai elemen berisikan komitmen untuk memastikan kawasan tetap stabil, damai, dan aman; menjunjung tinggi norma dasar yang berhubungan dengan kerjasama antarnegara, mengupayakan hubungan yang saling menguntungkan, meningkatkan solidaritas, sentralitas, dan persatuan ASEAN, yang terkandung didalam *Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security, and Stability in the Region*. Upaya yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi tampak berbeda dari rezim sebelumnya dalam merespons konflik ini. Presiden Jokowi terus mempererat hubungan dengan Cina melalui kerja sama bilateral dan multilateral di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dan pariwisata, dengan menindaklanjuti berbagai MoU yang didominasi oleh bidang ekonomi. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga berhasil menciptakan kerja sama antara negara-negara ASEAN dengan Cina.

Kebijakan yang keempat dilakukan melalui pendekatan kerja sama ekonomi sebagai salah satu bentuk respons pemerintah Indonesia terhadap konflik Laut Cina Selatan dilakukan untuk mengurangi tendensi ketegangan yang terjadi, dengan membentuk suatu paradigma bahwa kerjasama ekonomi dapat menjadi alat untuk saling menguntungkan dan saling menahan diri karena merasa saling membutuhkan. Pada tahun 2015, Presiden Jokowi melakukan agenda kunjungan ke Cina untuk mengumumkan pernyataan kerja sama antara Indonesia dengan Cina, dengan beberapa MoU yang disepakati yaitu (1) MoU bidang ekonomi (2) MoU Proyek Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (3) MoU pencegahan pajak antar kedua negara (4) MoU Maritim dan SAR, (5) MoU dukungan antara BUMN dengan Bank Pembangunan Cina (6) MoU kerja sama bidang Antariksa 2015-2020 (7) MoU kerja sama bidang infrastruktur dan industri. Tidak lama setelah klaim sepihak Cina atas Blok Natuna, Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Hangzhou, Cina, pada September 2016, untuk bertemu Presiden Xi Jinping yang berhasil mendorong terbentuknya tiga kesepakatan, yaitu (1) Upaya peningkatan perdagangan dengan memperkecil jarak defisit perdagangan Indonesia-Cina (2) Peningkatan investasi kedua negara terutama

bidang infrastuktru dan manufaktur (3) Cina diharapkan mampu mendorong masyarakatnya untuk berkunjung ke Indonesia sebagai upaya kerja sama bidang pariwisata.

Presiden Joko Widodo kembali melakukan pertemuan bilateral pada Mei 2017, di sela-sela pertemuan *Belt and Road Forum for International Cooperation* (BRF), dengan Presiden Xi Jinping, untuk membahas upaya peningkatan kerja sama ekonomi bilateral Indonesia-Cina yang menghasilkan persetujuan oleh pemerintah Cina untuk membuka akses pasar bagi berbagai produk peternakan dan pertanian Indonesia. Kemudian Indonesia menjadi tuan rumah lokakarya pengelolaan potensi konflik Laut Cina Selatan di tahun yang sama, yaitu pada November 2017 di Jakarta, yang dihadiri oleh 70 peserta yang berasal dari Malaysia, Myanmar, Singapura, Vietnam, Filipina, Laos, Cina, Brunei Darussalam, RRT, dan Indonesia (Idrus, 2017). Lokakarya ini menjadi langkah awal dalam membentuk sebuah iklim yang kondusif sebagai upaya penyelesaian konflik melalui pendekatan kerja sama ekonomi yang mana menghasilkan delapan proyek kerja sama antarnegara di kawasan Laut Cina Selatan. Pendekatan kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dapat dianalisa menggunakan *small theory Pasif-Positif*. Langkah Jokowi yang cenderung pasif dengan tidak bertindak secara agresif tetapi berupaya untuk menggunakan langkah-langkah damai demi mencapai persetujuan dengan Xi Jinping. Hal tersebut dibuktikan dengan terbentuknya berbagai MoU dan kesepakatan antara kedua negara yang tentunya juga menguntungkan kedua belah pihak.

Upaya yang tertuang dalam kesepakatan yaitu peningkatan perdagangan, investasi, dan pariwisata yang merupakan poin-poin penting dalam diplomasi *soft power* sesuai dengan strategi Presiden Jokowi dalam menangani kasus ini (Arifianto, 2018). Dampak dari kebijakan Jokowi bersifat positif dengan melihat latar belakang beliau sebagai pengusaha. Hal tersebut dapat mendorong para pengusaha lokal untuk berinovasi dan bersaing dengan pihak asing dengan melihat berbagai kesepakatan yang mengikat antara Indonesia dengan Cina. Selain itu, upaya kerja sama ekonomi juga memberikan dampak yang positif sebagai contoh bagi negara-negara terkait untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui upaya-upaya damai dan pencapaian kesepakatan. Menurut Presiden Jokowi, pendekatan kerja sama ekonomi dalam menyelesaikan konflik LCS diharapkan dapat memupuk komitmen, rasa saling percaya, dan menjaga stabilitas wilayah.

### **Kebijakan Luar Negeri Cina yang Diterapkan oleh Presiden Xi Jinping dalam Kasus Laut Cina Selatan**

Tindakan Xi Jinping dalam sengketa Laut Cina Selatan cenderung berupaya untuk mendominasi kawasan regional sebagai karakteristik yang melekat pada hegemon melalui berbagai langkah-langkah agresif, misalnya seperti penembakkan kapal nelayan Vietnam di sekitar Kepulauan Paracel pada tahun 2013 hingga 2014 yang terus memperpanas tensi kawasan. Karakteristik hegemon yang berupaya membuat tatanan tertentu demi mewujudkan kepentingan nasional ditunjukkan melalui keberhasilan upaya Cina yang menolak adanya intervensi negara luar kawasan dalam isu LCS, mempertahankan *Declaration of Conduct* (DOC) yang bersifat ambigu dan tidak mengikat, menunda pembentukan *Code of Conduct* (COC) yang akan mengatur perilaku negara secara lebih ketat di LCS, serta menghukum kapal-kapal negara lain yang memasuki wilayahnya dengan cara kekerasan.

Ambisi Xi Jinping untuk menguasai kawasan Laut Cina Selatan ditunjukkan melalui berbagai aktivitas *high profile*. Cina merupakan negara besar yang telah berhasil mengembangkan hubungannya ke berbagai negara melalui upaya mendayagunakan sumber-sumber *soft power* yang dimiliki dalam mendekati pihak lain. Nye menegaskan bahwa *soft power* juga termasuk kemampuan dalam membentuk agenda dan institusi internasional, yang secara nyata dapat terlihat sebagai bagian dari kebijakan luar negeri. Jalinan kerja sama antara Cina dengan ASEAN serta gagasan OBOR yang sedang berlangsung merupakan

tindakan persuasif Cina untuk menggandeng beberapa negara ASEAN, terlebih dengan melihat krusialnya kawasan LCS bagi proyek OBOR serta sebagai jalur perdagangan Cina-ASEAN. Namun ketidakstabilan keamanan di kawasan LCS berdampak pada kerja sama dan hubungan antara Cina dan ASEAN. Upaya Xi Jinping selama beberapa tahun terakhir berada pada tendensi resiko yang cukup besar apabila menetap dengan berbagai langkah kebijakan agresifnya dalam merespons sengketa Laut Cina Selatan. Hal tersebut membuat Xi Jinping sadar dan menggunakan kartu ekonomi sebagai kontrol terhadap kawasan ASEAN melalui upaya persuasif yaitu diplomasi ekonomi di ASEAN.

Upaya tersebut membuahkan hasil yaitu gagalnya ASEAN dalam merumuskan COC yang telah memakan waktu proses negosiasi selama kurang lebih 15 tahun sejak DOC, perubahan sikap ASEAN yang cenderung tidak menentang Cina, serta perbedaan pendapat yang ditunjukkan oleh beberapa negara anggota ASEAN. Konflik di Laut Cina Selatan terus menjadi isu hangat dalam hubungan internasional terlebih ketika orientasi politik luar negeri Cina dibawah pemerintahan Xi Jinping mengalami perubahan yang signifikan. Sejak memimpin Cina, Xi Jinping memetakan sebuah upaya diplomatik yang mengesampingkan orientasi *status-quo* dengan meletakkan kepentingan nasional sebagai tujuan utama pada tingkat global dan mengambil peran geopolitik yang berfokus di Asia (Arief, 2018).

Presiden Xi Jinping telah membawa Cina ke dalam ambisi besar menuju sebuah negara maju dengan pertumbuhan kapabilitas Cina secara ekonomi dan militer yang mendukung Cina semakin percaya diri dalam hubungan internasional. Cina terus berusaha mempertahankan integritas teritorial atas klaimnya di LCS berdasarkan alasan-alasan historis di wilayah LCS meskipun tidak memiliki landasan legalitas yang jelas (Darmawan, 2018). Maka berbagai kebijakan Xi Jinping dalam menangani sengketa LCS dapat dianalisa menggunakan *small theory* yaitu **Aktif-Negatif**. Hal tersebut didasari oleh tindakan aktif Presiden Xi Jinping dalam mencapai ambisi Cina sebagai negara maju untuk menguasai secara penuh klaim atas LCS. Kebijakan agresifnya juga terlihat dari penolakan campur tangan negara lain dalam menyelesaikan konflik LCS. Kebijakannya yang dinilai sangat memprioritaskan kepentingan nasional telah memengaruhi struktur internasional, khususnya negara-negara yang tengah berkonflik.

Kebijakan luar negeri Cina yang dikontrol dan dibentuk oleh Presiden Xi Jinping mengenai keamanan nasional dan internasional Cina telah mengesampingkan kontribusi ide dari pihak lain serta proses interaksi sosial. Tindakan asertif “Siapa Perang” yang dilakukan oleh Xi Jinping berpotensi mengancam negara-negara yang bersengketa karena mungkinnya perang antar negara menjadi jalan terakhir penyelesaian sengketa LCS (Alamsyah, 2020). Kebijakan Presiden Xi Jinping ini tergolong negatif karena memberikan dampak yang berpotensi mengancam keamanan dan perdamaian antar negara berkonflik di kawasan LCS. Presiden Xi Jinping telah meningkatkan eskalasi konflik menjadi lebih tegang karena kebijakan yang dikeluarkan lebih memprioritaskan kepentingan nasional dan kebangkitan geopolitik di Asia, terlebih khusus pertahanan dan keamanan klaim wilayah Cina di LCS. Hal ini tentu merugikan cukup banyak pihak karena yang berkepentingan di kasus LCS tidak hanya negara-negara di Asia.

Selain itu, melalui pendekatan kerjasama ekonomi, Presiden Xi Jinping juga berupaya untuk menyelesaikan konflik LCS agar bisa menguntungkan pihak yang berkonflik dan mencapai kepentingan nasionalnya. Bukan hanya demi memenuhi kepentingan materialisme semata, Presiden Xi Jinping juga mempunyai faktor ideasional dalam mempengaruhi sistem internasional. Perihal ini dapat dilihat melalui sikap ingin mendominasi yang dilakukan oleh Cina melalui penempatan kebijakan luar negerinya terlebih dalam sector kerjasama ekonomi. Demi memenuhi kepentingan ekonominya, Presiden Xi Jinping berusaha menguasai forum kerjasama kawasan LCS untuk bisa mempertahankan klaimnya. Laut Cina Selatan menyimpan banyak potensi ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan nasional, misalnya cadangan minyak yang diperkirakan mencapai 28 miliar barel. Selain itu,

sejak tahun 2003, Cina telah menjadi konsumen minyak terbesar ke-2 di dunia, sehingga penguasaan jalur pelayaran menjadi isu utama. Partisipasi Cina yang mengusulkan beberapa proposal dalam forum regional bersamaan dengan fokus Cina pada stabilitas kawasan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik Cina sampai tahun 2020 (Darmawan, 2018).

Dengan kebijakannya yang agresif dan koersif, Presiden Xi Jinping mampu melindungi kepentingan nasional dalam berbagai aspek termasuk aspek ekonomi Cina. Pada umumnya negara akan memilih jalur perundingan untuk melakukan kerjasama atau penyelesaian sengketa, sedangkan Presiden Xi Jinping cenderung akan memilih jalur militer dan menunjukkan *power*nya sebagai negara besar dan maju (Alamsyah, 2020). Jalur-jalur yang diambil Cina yaitu jalur perdagangan kerjasama seperti membentuk seperti *ASEAN-Cina Free Trade Agreement (ACFTA)* (Kusuma, 2020). Kebijakan yang diambil Cina berorientasi untuk membantu negara negara ASEAN menyelesaikan masalah ekonomi dan menjaga stabilitas finansialnya karena ASEAN merupakan pangsa pasar berpotensi bagi Cina. Cina juga berusaha memperbaiki citra baik melalui kerjasama dengan negara berkonflik di kawasan LCS. Kebijakan luar negeri Presiden Xi Jinping melalui pendekatan kerjasama ekonomi tergolong pada tindakan Aktif-Negatif. Peran aktif Presiden Xi Jinping dibuktikan dengan upaya untuk turut andil dalam kerja sama dan perkembangan ekonomi di kawasan LCS.

Demi memenuhi kepentingan nasionalnya, Presiden Xi Jinping aktif berperan mendominasi dalam forum-forum kerjasama ekonomi. Klaim Cina atas LCS berusaha dipertahankan oleh Presiden Xi Jinping melalui jalur kerjasama ekonomi karena beradaptasi dengan negara lain yang cenderung bertindak secara diplomasi. Namun tindakan Presiden Xi Jinping tergolong negatif karena sebab orientasi untuk mendominasi demi memperoleh kepentingan nasionalnya akan lebih dikedepankan daripada kepentingan bersama dalam sebuah forum atau organisasi internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan klaim sepihak atas wilayah perbatasan di LCS yang dilakukan oleh Xi Jinping sehingga memicu konflik antar negara di kawasan ini. Sikap Presiden Xi Jinping yang agresif pula memberi dampak negatif bagi negara-negara kecil untuk bisa turut aktif dalam forum kerjasama ekonomi.

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri yang diputuskan Presiden Xi Jinping termasuk tindakan yang **Aktif-Negatif** menurut *small theory*. Hal ini dikarenakan adanya sikap mendominasi Presiden Xi Jinping untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui klaim atas LCS dengan pendekatan pertahanan dan keamanan serta kerjasama ekonomi. Presiden Xi Jinping yang aktif didasari oleh karakternya yang asertif dan agresif dalam memutuskan kebijakan telah memberikan dampak negatif bagi negara lain di kawasan LCS. Dunia internasional juga memandang Cina sebagai negara yang terlalu memikirkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan situasi dan pandangan negara lain. Meskipun demikian, dampak negatif dari tindakan Presiden Xi Jinping ini telah berhasil membawa Cina menjadi negara yang besar, maju, dan mendominasi di kawasan LCS.

### **Komparasi Kebijakan Luar Negeri diterapkan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping dalam Kasus Laut Cina Selatan**

Indikator	Presiden Jokowi	Presiden Xi Jinping
Karakter Idiosinkratik	Defensif, <i>open image</i> , cenderung kurang optimis	Agresif, ambisius, cenderung mencari kekuasaan
Karakter Kepemimpinan	Pasif-Positif	Aktif-Negatif
Kebijakan Luar Negeri	Cenderung berusaha mencapai	Cenderung berusaha

terhadap Konflik LCS	<i>win-win solution</i> menggunakan diplomasi	dan	mendominasi dan menggunakan <i>power</i>
----------------------	---	-----	--

Source: penulis

Melalui tabel tersebut dapat dilihat bahwa Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping memiliki perbedaan pandangan dan pilihan kebijakan luar negeri. Presiden Jokowi memiliki karakter idiosinkratik yang defensif, *open image*, dan cenderung kurang optimis yang didasari oleh latar belakang dan karakter pribadi yang dimilikinya. Sedangkan Presiden Xi Jinping berkarakter idiosinkratik agresif, ambisius, dan cenderung mencari *power* dalam menjalankan kepemimpinannya yang disebabkan oleh sifat pribadi dan pengalaman hidupnya. Karakter kepemimpinan yang dimiliki kedua pemimpin juga berbeda dimana Presiden Jokowi bersifat Pasif-Positif dan Presiden Xi Jinping bersifat Aktif-Negatif. Hal tersebut merupakan hasil analisa menggunakan *small theory* dengan melihat bentuk kebijakan yang diambil oleh kedua pemimpin yang terlihat begitu kontras.

Presiden Jokowi yang cenderung pasif, cenderung menggunakan upaya damai dalam menjalankan kebijakannya namun memiliki hasil kebijakan yang positif, sedangkan Presiden Xi Jinping cenderung aktif bahkan agresif dalam memutuskan kebijakan luar negerinya dan memiliki pengaruh yang negatif terhadap negara-negara bersengketa karena berbagai kebijakan yang diterapkannya. Kemudian dalam menangani konflik LCS, Presiden Jokowi cenderung berusaha untuk bisa saling menguntungkan negara-negara berkonflik dengan strategi *win-win solution* dan menyelesaikan sengketa dengan jalur diplomasi yaitu melalui upaya kerjasama atau terlibat dalam forum negara-negara bersengketa. Sedangkan Presiden Xi Jinping cenderung bertindak mendominasi dan menyelesaikan sengketa dengan *power* dalam menangani konflik LCS yang dibuktikan dengan pengklaiman wilayah secara sepihak dan seruan “siap perang”. Hal ini tentu saja disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik dalam memimpin negara dari masing-masing presiden. Oleh sebab itu, penulis melakukan analisa dengan menggunakan *small theory* agar dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi perbedaan karakter pemimpin negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri.

### Kesimpulan

Pendekatan yang diterapkan Presiden Joko Widodo dalam konflik Blok Natuna di Laut China Selatan berdasarkan hasil penelitian terbagi menjadi empat. Pertama, pendekatan geopolitik dengan menggunakan konsep Poros Maritim Dunia sebagai kekuatan Indonesia disertakan dengan lima elemen sebagai tameng utama Indonesia dalam mengatasi isu atau konflik kemaritiman yang dianalisa menggunakan model *small theory* Pasif-Positif, bahwasanya Presiden Jokowi terlihat membentuk suatu model kebijakan luar negeri yang khas, namun bukan merupakan hasil dari pemikirannya sendiri secara utuh. Kedua, pendekatan pertahanan dan keamanan dilakukan sebagai bentuk kekuatan militer Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah territorial. Ketiga, dalam bidang hukum, Indonesia tetap berpedoman pada UNCLOS 1982 dan lebih mengupayakan berbagai diplomasi regional, misalnya di ASEAN, dan diplomasi antarnegara Indonesia-Cina sebagai bentuk partisipasi damai dalam merespons konflik Laut Cina Selatan dengan mengedepankan aspek kerja sama ekonomi. Keempat, pendekatan kerja sama ekonomi yang berhasil dicapai oleh Presiden Joko Widodo dengan Cina dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan investasi sebagai upaya pembangunan di berbagai sektor.

Berlainan dengan Kebijakan Luar Negeri Presiden Jokowi yang bersifat defensif, Kebijakan Luar Negeri Presiden Xi Jinping cenderung bersifat asertif. Kebijakan luar negeri Cina yang dikontrol dan dibentuk oleh Presiden Xi Jinping mengenai keamanan nasional dan internasional Cina telah mengesampingkan kontribusi ide dari pihak lain serta proses

interaksi sosial. Presiden Xi Jinping telah meningkatkan eskalasi konflik menjadi lebih tegang karena kebijakan yang dikeluarkan lebih memprioritaskan kepentingan nasional dan kebangkitan geopolitik di Asia, terlebih khusus pertahanan dan keamanan klaim wilayah Cina di LCS.

Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping memiliki perbedaan pandangan dan pilihan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Karakter kepemimpinan yang dimiliki kedua pemimpin juga berbeda dimana Presiden Jokowi bersifat Pasif-Positif dan Presiden Xi Jinping bersifat Aktif-Negatif. Hal tersebut merupakan hasil analisa menggunakan *small theory* dengan melihat bentuk kebijakan yang diambil oleh kedua pemimpin yang terlihat begitu kontras. Presiden Jokowi yang cenderung pasif, cenderung menggunakan upaya damai dalam menjalankan kebijakannya namun memiliki hasil kebijakan yang positif, sedangkan Presiden Xi Jinping cenderung aktif bahkan agresif dalam memutuskan kebijakan luar negerinya dan memiliki pengaruh yang negatif terhadap negara-negara bersengketa karena berbagai kebijakan yang diterapkannya.

Selain itu dalam menangani konflik LCS, Presiden Jokowi cenderung berusaha untuk bisa saling menguntungkan negara-negara berkonflik dengan strategi *win-win solution* dan menyelesaikan sengketa dengan jalur diplomasi yaitu melalui upaya kerjasama atau terlibat dalam forum negara-negara bersengketa. Sedangkan Presiden Xi Jinping cenderung bertindak mendominasi dan menyelesaikan sengketa dengan power dalam menangani konflik LCS yang dibuktikan dengan pengklaiman wilayah secara sepihak dan seruan “siapa perang”. Maka dari itu, dengan menggunakan *small theory* dapat dianalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan karakter pemimpin negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri masing-masing negara.

### Daftar Pustaka

- Alamsyah, P. R. (n.d.). *Xi Jinping dan Konstruksi Konflik di Laut Tiongkok Selatan*. Retrieved from Kontekstual Media: <http://bit.ly/3bMGBze> diakses pada 15 Januari 2021.
- Arifianto, A. (2018). *Politik Indonesia Dalam Konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna*. Retrieved from appptma.org: <https://cutt.ly/djRdlOV> diakses pada 15 Januari 2021.
- Cobus, P. (n.d.). *VoA Laut China Selatan*. Retrieved from projects.voanews.com: <http://bit.ly/2LIJJeat>
- Darmawan, A. B. (2015). Dinamika Isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis Sumber-Sumber Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Sengketa. *Jurnal Universitas Jenderal Soedirman*, 6.
- Darmawan, A. B. (2018). Perubahan Perilaku Politik Luar Negeri Tiongkok Terhadap Isu Laur Tiongkok Selatan. *Jurnal Sosial Politik*, Vol.4 No.2 Halaman 84-107.
- Fathun, M. L. (n.d.). Kebijakan Geopolitik Poros Maritim Di Era Jokowi Dalam Filosofi Frame Ideologis. *Power In International Relations (PIR)*, 135-152.

*Komparasi Kebijakan Luar Negeri Presiden Joko Widodo dengan Presiden Xi Jinping dalam Merespons Sengketa Laut Cina Selatan Menggunakan Pendekatan Small Theory*

Idrus, P. G. (n.d.). *Indonesia Dorong Kerjasama Selesaikan Konflik Laut Cina Selatan*. Retrieved from Sistem Penyiaran Berita AA (HAS): <http://bit.ly/3sAQkyG> diakses pada 15 Januari 2021.

Kusuma, N. M. (n.d.). *Pasang Surut Sengketa Laut Cina Selatan (ASEAN-China) dan Pengaruhnya Terhadap Perjanjian ACFTA*. Retrieved from <https://bit.ly/2XNfOuh> diakses pada 15 Januari 2021.

R. Aasana, S. S. (n.d.). *Kebijakan Pertahanan Indonesia Terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar Pada Masa Pemerintahan Jokowi*. *Cakrawala*. hlm 35-38.

Roy, S. (1995). *Diplomasi*. Jakarta: Grafindo Persada. hlm. 35.

Wuryandari, G. (n.d.). *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timur Leste: Sumber Ancaman & Kebijakan Pengelolaannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan P2P LIPI. hlm. 30.